



---

## MENAKAR KESUKSESAN APLIKASI LAYANAN SIPKD DI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BULELENG

Oleh

Luh Ernayani<sup>1)</sup> & Gede Sri Darma<sup>2)</sup>

Program Magister Administrasi Publik (MAP) UNDIKNAS GRADUATE SCHOOL  
Denpasar

Email: <sup>1</sup>[luherna025@gmail.com](mailto:luherna025@gmail.com) & <sup>2</sup>[sridarma@undiknas.ac.id](mailto:sridarma@undiknas.ac.id)

### Abstrak

Aplikasi layanan SIPKD merupakan aplikasi yang memudahkan dalam melakukan input data. Sebagai perkembangan teknologi informasi aplikasi ini memudahkan dalam pelaporan keuangan negara. Melalui aplikasi dapat merespon disrupsi teknologi sehingga tidak kesulitan dalam membuat pelaporan mulai perencanaan, implementasi dan evaluasi. Jenis penelitian menggunakan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Adapun informan dalam penelitian berjumlah 5 informan. Data bersumber dari hasil wawancara mendalam di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Hasil penelitian ini bahwa aplikasi layanan SIPKD sangat membantu dalam pelaporan keuangan negara, namun masih terdapat hambatan dalam pengoperasian layanan ini dikarenakan, kendala sinyal, kemudian SDM yang masih perlu pelatihan untuk meningkatkan kemahiran dalam menerapkan aplikasi ini. Masih perlu pelatihan dalam menggunakan aplikasi ini. Selain itu pula peran dan dukungan pemerintah dan anggota dalam melakukan input data harus disiplin sehingga tidak ada yang tidak tercatat. Kesimpulan hasil wawancara bahwa penerapan yang dilakukan sesuai harapan, dan ketepatan laporan di kumpul tepat waktu walaupun SDM belum maksimal menggunakan aplikasi dalam melakukan input data. Sehingga direkomendasi untuk dilakukan pelatihan mengenai menggunakan aplikasi layanan SIPKD.

**Kata Kunci:** Aplikasi, SIPKD, Pelaporan, Menakar & Teknologi

### PENDAHULUAN

Pesatnya perkembangan teknologi informasi komunikasi dimasa sekarang ini, membawa dampak yang besar dalam kehidupan manusia, terutama pemanfaatan teknologi informasi dilingkungan organisasi yang menjadi kebutuhan bagi setiap organisasi untuk mencapai efisien dan efektivitas organisasi, dengan berbagai bentuk aplikasi teknologi informasi. Aplikasi teknologi informasi merupakan bagian dari sistem informasi, dimana dalam aplikasi teknologi informasi terdiri dari proses mengumpulkan, mengirimkan, memasukan, mengolah dan menyimpan data-data yang disebabkan oleh aktivitas atau operasi organisasi yang bertujuan

mempercepat pekerjaan yang ada di dalam organisasi tersebut (Goodhue dalam Jumaili, 2005).

Semakin cepatnya waktu untuk mengakses dan output sistem yang dihasilkan sesuai dengan apa yang di inginkan user maka intensitas pemakaian sistem akan meningkat. Pemakaian yang berulang-ulang ini dapat dimaknai adanya sebuah kepuasan oleh user. Sering ditemukan bahwa teknologi yang diterapkan dalam sistem informasi tidak tepat atau tidak dimanfaatkan secara maksimal oleh pemakai sistem sehingga penerapan sistem informasi kurang memberikan manfaat atau bahkan tidak memberikan manfaat sama sekali dalam peningkatan kinerja individu. Faktor-



faktor yang menjadi dasar pengukuran keberhasilan sistem informasi adalah kualitas informasi (*information quality*), kualitas sistem informasi (*system quality*), kualitas pelayanan (*service quality*), intensitas penggunaan sistem informasi (*use*), kepuasan pengguna akhir sistem informasi (*end user satisfaction*), dampak individual (*individual impact*), dan dampak organisasional (*organizational impact*) dari sistem informasi, agar kualitas sistem menjadi baik maka dibutuhkan sistem aplikasi yang baik pula untuk dapat mengolah data menjadi informasi yang berguna.

Penerapan sistem informasi di pemerintah daerah merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya menciptakan good governance yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Setiap sistem informasi yang ada diharapkan dapat memberikan kemudahan dan meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat dan stakeholder pemerintah daerah. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintahan bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi informasi adalah direalisasikan alat bantu pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk sistem informasi terkomputerisasi yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel. SIPKD memfasilitasi kegiatan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi penganggaran, perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD yang sudah di implementasikan dengan metode aplikasi basis kas harus dilakukan penyesuaian metode aplikasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Penyesuaian aplikasi SIPKD sebagai alat bantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan merubah alur aplikasi dari basis kas menjadi basis akrual. Dalam pelaksanaan penyesuaian aplikasi SIPKD tersebut tentunya sangat mempengaruhi terhadap pola implementasi aplikasi misalnya tentang perlakuan aplikasi ketika menatausahakan pendapatan dari pengakuan target pendapatan, terbitnya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) sampai dengan dilunasinya Surat Ketetapan Pajak (SKP) atau Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan pelaksanaan jurnal akuntansi terhadap transaksi – transaksi tersebut. Yang terjadi saat ini adalah bagaimana berbasis akrual dapat merespon disrupti teknologi.

Disrupti teknologi (*technology disruption*) yang terjadi di berbagai aspek kehidupan tengah menjadi sorotan dalam berbagai diskursus. Era disrupti adalah era ketika teknologi telah memporandakan lanskap proses bisnis yang berlaku. Dengan demikian, transformasi dalam organisasi menjadi mutlak. Arus deras perkembangan teknologi tidak lagi dapat dibendung. Sehingga keberadaan aplikasi SIPKD diharapkan mampu



merespon disrupsi teknologi yang bersifat digitalisasi. Dinamika teknologi bukan saja melanda dunia tapi juga Indonesia. Dari 253 juta penduduk Indonesia, separuhnya adalah generasi milenial atau generasi yang akrab dengan internet. Sebanyak 52,17% atau sekitar 132 juta adalah pengguna internet, 65% penduduk berbelanja *online* sebulan sekali, dan 19,92% dari total populasi penduduk merupakan nasabah pengguna *e-banking* di Indonesia (Ari Nugroho dalam Infobank, September 2017). Digitalisasi telah menjamur di berbagai aspek kehidupan masyarakat yang cepat atau lambat, disadari atau tidak telah masuk dalam ranah kebijakan publik dan pengelolaan uang negara.

Saat ini, baru segelintir organisasi pemerintahan yang cukup matang dalam melakukan transformasi digital sehingga memerlukan akselerasi transformasi digital. Begitu pula dengan keuangan negara, akselerasi digitalisasi menjadi mutlak untuk mencapai kematangan digital (*digital maturity*) yakni kondisi ketika teknologi digital telah mentransformasi proses organisasi, sumber daya manusia dan model pelayanan publik. Dengan kematangan digital, manajemen keuangan negara tidak akan tertinggal atau berada dalam persimpangan, namun sebaliknya mampu memfasilitasi penyediaan layanan masyarakat yang lebih berkualitas pada era disrupsi.

Delloite dalam laporan tahun 2015 atas survei terhadap 1.200 pegawai pemerintah pada lebih dari 70 negara, termasuk wawancara terhadap 140 pemimpin (*leaders*) pemerintahan dan ahli di luar pemerintahan yang berjudul “*The Journey to Government Digital Transformation*” menyajikan temuan yang menarik. 75% responden menganggap teknologi telah mentransformasi pola kerja sektor publik. Hampir seluruh responden (sekitar 96 %) menyatakan bahwa dampak teknologi terhadap organisasi pemerintahan cukup signifikan. Survei tersebut juga menunjukkan bahwa pemerintahan di berbagai belahan dunia berada

pada tingkatan atau level transformasi digital yang berbeda. Level yang dianggap telah matang hanya sedikit saja, sedangkan sebagian besar pemerintahan berada pada tahapan awal atau pengembangan dari transformasi digital.

Ironinya, dampak utama teknologi yang masif belum dibarengi dengan kapasitas digital organisasi. Hal ini terbukti dari hanya 30% responden yang menyatakan bahwa organisasi mereka memiliki kapasitas digital yang lebih baik dibandingkan dengan organisasi sektor publik lainnya. Sedangkan hampir 70% responden mengatakan kapasitas digital organisasi jauh tertinggal dari kapasitas digital institusi sektor privat.

Pada era disrupsi, dunia bisnis dianggap relatif lentur, tanggap dan antisipatif dalam merespons perkembangan teknologi. Hal tersebut berbeda dengan tingkat responsivitas sektor publik. Birokrasi cenderung malas, lamban bahkan terseok-seok dalam menghadapi perubahan yang sesungguhnya tidak lagi linier. Perbedaan tersebut utamanya disebabkan karakteristik sektor publik yang spesifik terkait dengan kebijakan dan regulasi. Dalam konteks manajemen keuangan negara, pengaturan proses bisnis diatur *rigid* (kaku) dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai hierarkinya mulai dari tataran Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan aturan turunan lainnya. Berbagai perubahan yang diinisiasi untuk mengadopsi teknologi dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas keuangan negara, harus didasarkan pada regulasi. Inilah yang menyebabkan inisiatif baru kerap terbentur dengan regulasi.

Dalam era disrupsi fungsi IT bergeser dari sekadar pendukung proses bisnis menjadi suatu fungsi yang dapat mentransformasi proses bisnis. Lazimnya, fungsi IT adalah mendukung proses bisnis keuangan yang tertuang berbagai peraturan, sehingga pelaksanaan tugas menjadi lebih sederhana, mudah dan efisien. Pada era disrupsi, teknologi berjalan di depan, dan “memaksa” terjadinya perubahan proses bisnis keuangan. Logikanya



adalah bahwa IT dan digitalisasi telah membuka ruang untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi transaksi keuangan negara. Adapun manfaat yang diperoleh masyarakat adalah penghematan waktu dan kenyamanan dengan menggunakan pelayanan *online* untuk mengakses pelayanan publik. Konsekuensinya regulasi dituntut lebih luwes dan fleksibel.

Pada sektor publik, penyesuaian pola kerja akibat arus teknologi memiliki konsekuensi bahwa kebijakan dan regulasi harus pula disesuaikan. Sebut saja inisiatif IFMIS (*Integrated Financial Management System*) yang mengintegrasikan berbagai platform aplikasi keuangan yang berbeda-beda menjadi satu aplikasi yang terintegrasi. IFMIS telah memudahkan dan menyederhanakan proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, bahkan telah memangkas anggaran *Information Technology* (IT). Namun, proses digitalisasi keuangan publik harus mencurahkan banyak sumber daya untuk menyesuaikan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum IT dapat mendobrak tatanan yang ada menjadi lebih baik.

Dinamika lainnya adalah otomasi perbankan yang sejalan dengan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah dicanangkan Pemerintah. Kelenturan kebijakan dan regulasi dalam merespon dinamika industri perbankan sebagai mitra pemerintah dalam melakukan transaksi keuangan publik yang lebih berkualitas menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan pengaturan manajemen keuangan negara yang kaku dan upaya mengubahnya cenderung prosedural dan bersifat *redtape* (formalitas dan prosedur berbelit-belit). Dalam mengintroduksi digitalisasi dalam pembayaran, ritme birokrasi harus mulai diselaraskan dengan ritme perbankan dan industri terkait lainnya. Birokrasi yang gagal menyesuaikan ritme tersebut tidak akan efektif dalam mencapai

tujuan mulianya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sangatlah jelas, potensi perolehan manfaat dari digitalisasi keuangan negara cukup signifikan. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan keuangan negara dalam era digital ini dapat bertransformasi dengan baik. Pertama, investasi dalam bidang IT perlu terus ditingkatkan. Investasi dalam bidang IT terkait dengan dua hal yaitu penggunaan *digital platforms* dan pemanfaatan *big data*. Penggunaan *digital platforms* telah diinisiasi melalui pengenalan dan implementasi IFMIS dalam keuangan negara. Adapun *big data* secara umum mengacu pada suatu referensi penyimpanan data dalam jumlah besar, yang dapat mengumpulkan dan menganalisis data secara *real-time*, serta memfasilitasi perolehan data dalam berbagai format dan melalui berbagai mekanisme. Dengan belanja APBN sekitar Rp2.133 triliun atau hampir 20% PDB, investasi IT dapat memfasilitasi optimalisasi dan analisis data transaksi keuangan yang signifikan.

Transformasi digital perlu dilakukan dengan hati-hati terutama dalam menerjemahkan kemajuan teknologi ke dalam sistem dan prosedur keuangan negara, berupa kebijakan atau regulasi. Pengelolaan keuangan negara didominasi oleh aspek akuntabilitas karena uang pembayar pajak merupakan sumber utama dompet publik yakni APBN. Untuk itu, tata kelola yang baik sebagai penyokong akuntabilitas harus terus dijaga pada saat transformasi digital diperkenalkan. Kekeliruan dalam mencermati hal tersebut dapat dapat mengakibatkan para pengelola keuangan tersandung karena timbulnya inefisiensi bahkan kerugian keuangan negara.

Perlunya pengembangan dan peningkatan kompetensi digital. Perekrutan pegawai juga dapat diarahkan pada upaya menggaet calon pegawai yang memiliki kemampuan dan literasi digital, untuk mempercepat transformasi digital. Edukasi



digital juga perlu digalakkan dalam meningkatkan literasi digital para pengelola keuangan negara. Laporan Keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik ; relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) bisa saja mengalami hambatan akibat ketidaksesuaian penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah oleh aparat pemerintah seperti diantaranya sumber daya manusia yang kurang , kapasitas memori dalam server yang kurang cukup, salah penginputan data, salah input kode transaksi, adanya gangguan yang disebabkan terjadinya sistem yang eror, mesin yang bermasalah, serta disebabkan masalah teknis lainnya (Bagoë, 2013). Kasus yang dihadapi Pemerintahan Kota Sawahlunto bahwa Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) belum mampu menghasilkan seluruh komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Sawahlunto Tahun anggaran 2014. Hal ini ditandai dengan dimanfaatkannya SIMDA-BPKP dalam penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 (Silvia, 2014).

Penggunaan aplikasi SIPKD dalam penganggaran dan penatausahaan telah mampu menghasilkan laporan secara efektif , namun dalam penyusunan LKPD, SIPKD masih memiliki banyak kelemahan termasuk beberapa fasilitas prosedur yang dibutuhkan daerah dan pada awal tahun 2015, tiga dari sampel penelitian beralih menggunakan SIMDA karena adanya kekhawatiran ketidakmampuan SIPKD dalam penerapan akuntansi berbasis akrual (Suhairi, 2015). Perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis

akrual yang berdampak langsung ke perubahan metode dan alur aplikasi pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini SIPKD, menjadi tantangan serta target utama pemerintah daerah untuk melaksanakan penyesuaian aplikasi dari metode basis kas menjadi aplikasi dengan metode basis akrual, sehingga merespon disrupsi teknologi. Hal ini juga dilaksanakan di Pemerintahan Kabupaten Buleleng sebagai konsekuensi pelaksanaan perubahan metode pengelolaan keuangan daerah dari basis kas menjadi basis akrual. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi sistem aplikasi layanan SIPKD merespon disrupsi teknologi di Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan ataupun Implementasi sistem aplikasi layanan SIPKD merespon disrupsi teknologi di Kabupaten Buleleng.

## LANDASAN TEORI

### a. Implementasi Kebijakan

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*" berasal dari kata kerja *to implement*. menurut Webster's Dictionary (dalam Tachjan, 2006 :23), kata *implement* berasal dari bahasa latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere* kata *implere* dimasukdikan *to fill up; to fill in* yang artinya mengisi penuh, melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi. Secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana alat untuk memperoleh hasil. Menurut Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman 1996;295) implementasi adalah penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan adalah kemampuan untk membentuk hubungan-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Dalam pandangan Charles O. Jones (dalam Nashir Budiman



1996:296) ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu : (1) Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. (2) Interpretasi, mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. (3) Penerapan, peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Implementasi menurut ahli-ahli di atas merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang dapat juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang. Kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan. Menurut Nugroho (2011:627) masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

#### **b. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu,

yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Sistem di definisikan oleh Wilkinson (1992) dalam Mulyono (2009) Sistem adalah suatu kerangka kerja terpadu yang mempunyai satu sasaran atau lebih, sedangkan menurut McLoad dan Schell, (2001) Sistem adalah sekelompok elemen-elemen yang terintegrasi dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Informasi menurut Supriyanto, (2005) adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang, sedangkan informasi menurut Wilkinson (1992) merupakan komoditas vital bagi sebuah organisasi atau perusahaan, yang terdiri dari data yang telah ditransformasikan dan dibuat lebih bernilai melalui pemrosesan.

Salah satu teknologi dan sistem informasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD). SIPKD Merupakan aplikasi yang dibangun oleh Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Aplikasi SIPKD diolah oleh Subdit Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah SIPKD adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan meningkatkan efektifitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel (Saragih, 2008). Aplikasi ini juga merupakan salah satu manifestasi aksi nyata fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka penguatan persamaan persepsi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dalam



penginterpretasian dan pengimplementasian berbagai peraturan perundang-undangan.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan data kualitatif. Metode penelitian kualitatif memiliki dasar deskriptif guna memahami suatu fenomena dengan lebih mendalam. Penelitian kualitatif menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut. Penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif yaitu untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan diteliti. Metode Pengumpulan menggunakan metode wawancara dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Pengambilan data dilakukan di Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng. Jenis data termasuk data primer dari hasil wawancara mendalam. Dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan laporan-laporan yang telah dipublikasikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Aplikasi SIPKD adalah aplikasi yang dibangun oleh dirjen keuangan daerah kemendagri dalam rangka percepatan transfer data dan efisiensi dalam penghimpunan data keuangan daerah. Berdasarkan PP No. 65/2010 tentang perubahan atas PP No. 56/2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrual pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada

gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumberdaya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan. Seiring dengan kemajuan teknologi pemerintah Kabupaten Buleleng mempermudah laporan keuangan dengan layanan SIPKD yang harapannya mampu mengefektifkan dan efisiensi dalam input data.

Teori stakeholder juga menjelaskan tentang keberadaan pemerintahan dalam menjalankan kegiatannya untuk memberikan kontribusi bagi stakeholdernya (pemegang saham, kreditur, pemerintah, masyarakat, konsumen, supplier, analis dan pihak lain). Organisasi harus peduli dengan kepentingan stakeholders ketika membuat keputusan strategis. Dari pernyataan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dipengaruhi oleh peran stakeholder dan mempengaruhi stakeholder pula. Untuk mendapatkan hasil yang akurat dan terpercaya dalam pengimplementasian sistem akuntansi berbasis akrual harus didukung oleh berbagai pihak terutama sumber daya manusianya, dalam mengimplementasikan sistem layanan aplikasi SIPKD ada beberapa kendala yang terjadi. Dengan pelaporan berbasis akrual, penggunaan dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut. SAP berbasis akrual mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Sesuai yang di



ungkapkan oleh pihak BAPPEDA yang menyatakan bahwa: Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual diterapkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna informasi laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dengan berpedoman pada standar lebih mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan substansi yang berperan penting dalam kepuasan publik atas pengelolaan keuangan di kantor ini. Pengelolaan keuangan yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas membutuhkan kinerja yang baik. Oleh karena itu, untuk memenuhi kepuasan publik, aparatur instansi ini harus memperhatikan kinerja terutama dalam pengelolaan keuangan.

Menurut Kotler, 2005 ada lima dimensi penentu mutu jasa/pelayanan yaitu: Tangibles (bukti fisik), Empathy (kepedulian), Responsiveness (ketanggapan) Reliability (keandalan), dan Assurance (jaminan kepastian). Myers, et. al. (1997) menyatakan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Apabila pengguna sistem informasi merasakan bahwa kualitas layanan yang diberikan oleh penyedia paket program aplikasi akuntansi baik, maka ia akan cenderung untuk merasa puas menggunakan sistem tersebut. Berdasarkan persepsi pengguna, penyedia layanan kurang melakukan transfer knowledge/membagi pengetahuan tentang pengoperasionalan Sistem/Software akuntansi serta tidak ada pendidikan dan pelatihan khusus untuk menggunakan aplikasi tersebut kepada pengguna. Walaupun demikian secara total kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap Keuntungan / manfaat sistem bagi organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengguna belum merasa puas terhadap Kualitas pelayanan yang diberikan dan keuntungan / manfaat SI, namun penyelenggaraan SIKD dirasakan sangat membantu tugas – tugas pengelolaan keuangan daerah. Penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah pemerintah Kabupaten

Buleleng sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pengguna, khususnya terkait dengan produktivitas kerja karena dengan menggunakan sistem informasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas menjadi lebih singkat sebagaimana diungkapkan oleh seorang responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melalui wawancara mendalam sebagai berikut : Sangat berpengaruh. Karena dengan adanya sistem aplikasi SIPKD semua pencatatan/pembukuan dalam sistem akuntansi yang harus dipenuhi sudah terbantu dengan sistem SIPKD. Dengan melakukan proses inputing data secara tertib dan teliti, semua jenis pelaporan dan pembukuan dapat diakomodir oleh sistem Siadinda. Waktu yang dibutuhkan menjadi jauh lebih singkat. (Lesatari, 2015) Motivasi manajemen dalam penelitian berpengaruh positif secara terhadap keuntungan / manfaat sistem bagi organisasi namun Pengujian pengaruh tidak langsung motivasi manajemen terhadap keuntungan/manfaat sistem bagi organisasi melalui variabel kepuasan pengguna dan pengujian pengaruh langsung motivasi manajemen terhadap kepuasan pengguna menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi manajemen tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna dan kepuasan pengguna tidak menjadi intervening pengaruh motivasi manajemen terhadap keuntungan/ manfaat sistem bagi organisasi.

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi terkait penelitian efektivitas sistem informasi karena variabel motivasi manajemen tidak dianalisis dalam Update D&M IS Success Model (DeLone dan McLean, 2003). Motivasi manajemen merupakan pendorong semangat bagi anggota organisasi dalam meningkatkan produktivitas, kedisiplinan dan meningkatkan kesejahteraan sehingga memberikan dampak bagi individu maupun organisasi. Kepuasan Pengguna mengintervening secara parsial





pengaruh Kualitas sistem terhadap Keuntungan / Manfaat sistem bagi organisasi yang berarti bahwa keuntungan/manfaat sistem akan semakin meningkat apabila kualitas sistem mampu meningkatkan kepuasan pengguna SIKD. Kepuasan Pengguna mengintervening secara penuh pengaruh Kualitas Informasi terhadap keuntungan/manfaat sistem bagi organisasi yang berarti bahwa Kualitas Informasi hanya mampu meningkatkan keuntungan/manfaat sistem apabila pengguna merasa puas terhadap Kualitas Informasi yang dihasilkan.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara keseluruhan sukses diterapkan di Pemerintah Kabupaten Buleleng berdasarkan persepsi pengguna adalah efektif dalam membantu pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik kualitas sistem dan andal informasi yang diperoleh maka pengguna sistem akan merasa semakin puas. Pengguna sistem yang semakin puas dibarengi dengan motivasi manajemen yang baik maka keuntungan/manfaat sistem bagi organisasi juga semakin meningkat. Untuk lebih meningkatkan efektivitas Sistem Informasi, penyedia layanan agar meningkatkan kualitas pelayanan yaitu diantaranya dengan memberikan pendidikan dan pelatihan/transfer knowledge pengoperasionalan sistem bagi pengguna, karena sumber daya manusia merupakan faktor penentu kesuksesan implementasi sistem informasi. Survey kepuasan pengguna sistem informasi secara berkala perlu dilakukan, sebagai bahan evaluasi dan masukan untuk pengembangan sistem oleh pengambil kebijakan. Sistem informasi keuangan daerah yang telah ada diharapkan dapat diaplikasikan secara on line dan terintegrasi dengan semua lini yang terkait seperti aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah dan aplikasi pengelolaan Pendapatan sehingga penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah Pemerintah Kabupaten

Buleleng menjadi benar – benar efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel serta perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan strategi untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi melalui peningkatan budaya kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPK – RI. 2013, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I, Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan.
- [2] BPK - RI. 2014. LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2013 pada Pemerintah Kabupaten Buleleng, Nomor : 01.A/LHP/XIX.DPS/05/2014, Tanggal 28 Mei 2014.
- [3] Chen, Y-K., Chen, Y-J., Chiu, F-R., Wang, C-Y. (2015). “Towards Successful Cloud Ordering Service”, Business Systems Research, Vol. 6, No.1
- [4] Chin, W. 1998. The Partial Least Squares Approach for Structural Equation Modelling. In Marcoulides, G. A. (Ed). Modern Method for Business Research.
- [5] Mahwah. NJ. Erlbaum. DeLone, William. H and McLean, Ephraim.R. 2003. “The DeLone and McLean model of information systems success: A ten-year update”, Journal of management Information Systems, vol. 19 (4).
- [6] DeLone, William.H and McLean, Ephraim.R. 1992. Information systems success: The quest for the dependent variable. Information Systems Research, 3,1.
- [7] Dewi, Putu Ayu Ratna dan Mimba, Ni Putu Sri Harta. 2014. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Pada Kualitas Laporan Keuangan. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 8.3(2014):442-457. Tersedia di Tersedia di [http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem\\_informasi\\_manajemen](http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_informasi_manajemen) [diunduh Rabu, 29 April 2015].
- [8] Ghozali, Imam. 2008. Structural Equation Modeling Metode Alternatif dengan



- 
- Partial Least Square. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- [9] Indrayani, Etin. 2011. Pengelolaan Sistem Informasi Akademik Perguruan Tinggi Berbasis Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK). Jurnal Penelitian Pendidikan Vol. 12 No. 1. Tersedia di <http://jurnal.upi.edu/file/5.pdf> . [diunduh Kamis, 30 April 2015).
- [10] Lumbantobing, J. 2015. Evaluasi Kualitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Vol 10. No. 1. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/godwill/article/view/8449>. 7 Februari 2018.
- [11] Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi ke-3, Cetakan ke-5. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- [12] Siti, M. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaL Dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Jember. Fakultas Ekonomi.
- [13] Universitas Jember. Vol 2, No 1 (2015). [repository.unmuhjember.ac.id/1473/1/JURNAL.pdf](http://repository.unmuhjember.ac.id/1473/1/JURNAL.pdf). 7 Februari 2018. Sutarman. 2017. Pengantar Teknologi Informasi. PT. Bumi Aksara, Jakarta.